

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)

Fifit Nur Walyati^{1*}, Farida^{2*}

Program Studi Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Magelang, Indonesia

*email: fifitnur19@gmail.com, farida_feb@ummgl.ac.id

ABSTRACT

Kata Kunci:
Community
Participation;
Competence;
Internal Control
System; Village
Fund
Accountability

This study aims to examine the effect of Community Participation, Competence and Internal Control Systems on Village Fund Management Accountability. This research uses agency theory. The data used in this study are primary data based on questionnaires distributed to village apparatuses of 130 copies, questionnaires returned and can be processed according to criteria of 110 copies. This research method uses a sample of village apparatuses working at the Village Head Office in Muntilan Subdistrict. Samples in this study are 110, based on the purposive sampling method, the sample used is apparatus who has a minimum junior high school / MTS degree and has a working period of more than one year . The selection of hypothesis testing in this study uses multiple linear regression. The results showed that community participation and internal control systems had a positive effect on Village Fund Management Accountability, while Competence had no effect on Village Fund Management Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan teori agensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan pada kuesioner yang dibagikan kepada aparatur desa sebanyak 130 eksemplar, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sesuai kriteria sebanyak 110 eksemplar. Metode penelitian ini menggunakan sampel aparatur desa yang bekerja pada Kantor Kepala Desa Se-Kecamatan Muntilan, Sampel dalam penelitian ini adalah 110, berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang digunakan yaitu aparatur yang memiliki gelar minimal SMP/MTS dan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dan Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang sangat kompleks di desa menjadi alasan bagi desa untuk berkembang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan Keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya kelemahan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah (Semarang.bpk.go.id). Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Faktor tingkat ketidakefektifan peningkatan alokasi dana desa tersebut dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, kurangnya pengawasan dari pemerintahan daerah, mengakibatkan penggunaan dana tersebut tidak dapat teroptimalisasi dengan baik. Selain itu juga, ditemukan bahwa monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa masih belum optimal. Perbaikan penggunaan dana di desa diharapkan agar dana tersebut tepat sasaran. Misalnya, dengan melakukan pendampingan dan pelatihan masyarakat (<http://www.mediaindonesia.com>).

Menindaklanjuti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Bupati Kabupaten Magelang berharap kepada pemerintah desa khususnya Kepala Desa untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar sesuai tujuan dan sasaran. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan dana desa yang diberikan setiap tahunnya. Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memperoleh porsi anggaran dana desa yang relatif besar selama lima tahun berturut. Dari besaran alokasi formula tersebut, Kabupaten Magelang memperoleh porsi anggaran dana desa sebesar:

Tabel 1. Rincian Anggaran Dana Desa Se-Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Anggaran	Presentase
2015	Rp 101,15 miliar	7,63%
2016	Rp 226,98 miliar	17,12%
2017	Rp 289,61 miliar	21,84%
2018	Rp 329,26 miliar	24,83%
2019	Rp 378,80 miliar	28,57%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang selama lima tahun berturut mendapatkan porsi dana desa sebesar 4,3% dari dana desa se-Jawa Tengah. Namun di dalam pelaksanaannya masih

ditemukan adanya kelemahan. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2019, BPK RI menemukan adanya kelemahan di dalam Sistem Pengendalian Intern, yakni belum tertibnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa, yang mengakibatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa belum dapat dievaluasi. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, serta kurangnya pemahaman pemerintah desa atas peraturan berlaku dalam menyampaikan pertanggungjawaban Dana Desa. Selain itu, Kajian yang dilakukan oleh KPK tentang Dana Desa juga menemukan permasalahan bahwa alokasi formula pembagian Dana Desa yang ditetapkan belum mengacu pada aspek pemerataan (DPR R1, 2019).

Kecamatan Muntilan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Magelang yang terdiri dari 13 desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2019 menunjukkan bahwa dana desa di Kecamatan Muntilan masuk dalam tingkat penyerapan dana desa paling 4 rendah, dibuktikan dari adanya selisih dana desa lebih Anggaran (SilPA) yang mencapai Rp571.098.573. Di bawah ini merupakan rincian dana desa seKecamatan Muntilan tahun 2019.

Tabel 2. Rincian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Muntilan Tahun Anggaran 2019

No	Desa	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Gondosuli	966,981,000	957,214,742	9,766,258
2	Tamanagung	1,078,536,000	1,060,092,000	18,444,000
3	Sedayu	1,069,525,000	998,592,851	70,932,149
4	Gunungpring	1,102,499,000	1,088,004,850	14,494,150
5	Pucungrejo	963,608,000	738,858,434	224,749,566
6	Menayu	929,035,000	910,930,700	18,104,300
7	Ngawen	965,004,000	894,209,000	70,795,000
8	Keji	1,106,945,000	1,101,469,000	5,476,000
9	Congkrang	939,648,000	928,467,600	11,180,400
10	Sokorini	999,036,000	955,236,250	43,799,750
11	Sriwedari	936,322,000	897,749,000	38,573,000
12	Tanjung	820,060,000	820,060,000	-
13	Adikarto	1,039,149,000	994,365,000	44,784,000

Sumber: Pemerintah Kecamatan Muntilan

Kecamatan Muntilan memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA). Hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap sehingga menjadi SiLPA. Keterlambatan penyampaian dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menyebabkan pemerintah desa tidak segera melakukan pengadaan barang dan jasa, akibatnya proses pengadaan menjadi tertunda dan menimbulkan tidak terealisasinya program yang telah dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan Periansya & Sopiyan (2020) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin Akuntabel. Begitu pula

penelitian yang dilakukan Dewi & Gayatri (2019), Umaira & Adnan (2019), Aulia *et al.* (2018), Perdana (2018) dan Mada *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Arifiani & Sjaf (2018), Kumalasari (2019), dan Nurkhasah (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian dari Periansya & Sopiyan (2020) bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diperkuat dengan penelitian Umaira & Adnan (2019), Sapartiningsih *et al.* (2018) terdapat pengaruh yang positif signifikan kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian dari Alminanda & Marfuah (2018) dan Nurul (2017), Prasetya *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keterlibatan Sistem Pengendalian Internal dalam mengelola keuangan desa menjadikan lebih terbuka dan transparan. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019), Yesinia *et al.* (2018) dan Saragih & Kurnia (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan Widayatama & Novita (2017), Yudianto & Sugiarti (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Periansya & Sopiyan (2020) Adapun persamaannya yaitu meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan menggunakan semua variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Pertama menambahkan variabel Sistem Pengendalian Internal karena dengan penggunaan Sistem Pengendalian Internal, diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga dapat menghindari keterlambatan pencairan dana desa periode berikutnya. Penambahan variabel Sistem Pengendalian Internal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Atiningsih & Ningtyas (2019), yang menyatakan semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Perbedaan kedua, penelitian ini akan dilakukan pada desa-desa se-Kecamatan Muntilan. Kendala atas kurang optimalnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Muntilan dikarenakan kompetensi aparatur desa masih terbatas dalam hal pemahaman pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa. Hal tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran belum maksimal karena masih terdapat selisih dana desa lebih Anggaran (SilPA) yang mencapai Rp571.098.573 dan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa atau penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) menyebabkan pemerintah desa tidak segera melakukan pengadaan barang dan jasa, akibatnya proses pengadaan menjadi tertunda dan menimbulkan tidak

terrealisasinya program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Muntilan masih perlu ditingkatkan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara Monitoring cost.

Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran. Sehingga apabila partisipasi penganggaran berjalan dengan efektif dan efisien maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desanya juga akan baik. Dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa (Sugista, 2017). Periansya & Sopiyan (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

H1: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi

Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010). Kompetensi aparatur desa merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi yang ada dengan cara *bounding cost*. Perangkat desa yang paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Penelitian Periansya & Sopiyan (2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung penelitian Umaira & Adnan (2019), Sapartiningsih, dkk (2018), menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

H2: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa

Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2017:129) Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan. Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara monitoring cost. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal.

Sistem Pengendalian Internal dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas, (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis.:

H3: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data dikumpulkan secara langsung dari responden dengan sumber asli. Sumber tersebut adalah aparatur desa yang bekerja di Kantor Kepala Desa se-Kecamatan Muntilan kabupaten Magelang.

Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kantor Kepala Desa se-Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 13 Desa di Kecamatan Muntilan yang mendapatkan Dana Desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan, kasi perencanaan, kepala dusun dan badan permusyawaratan desa.
2. Memiliki masa kinerja minimal 1 tahun
3. Tingkat pendidikan minimal SMP/MTS

Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi linier. Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur di seluruh Desa Se-Kecamatan Muntilan Kantor Kepala Desa yang diteliti sebanyak 13 kantor. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Kuesioner ditujukan kepada Perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan, kasi perencanaan, kepala dusun dan badan permusyawaratan desa. Kuesioner yang disebar sebanyak 130 kuesioner. Jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 110 responden atau sebesar 84,62%. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki dan tingkat pendidikan SMA. Sebagian besar responden berumur ≥ 30 tahun dengan jabatan sebagai kaur keuangan, kaur umum dan kaur perencanaan dan lama bekerja ≥ 10 tahun.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
APDD	110	2	5	4.35	.519
PM	110	2	5	3.88	.545
KAD	110	2	5	3.71	.542
SPI	110	3	5	4.04	.303
Valid (listwise)	110				

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

Akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai minimum 2 dan nilai maksimum 5 dengan rata-rata jawaban responden untuk 5 pernyataan adalah 4,35. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang menggambarkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sedangkan partisipasi masyarakat bernilai minimum 2 dan nilai maksimum 5 dengan rata-rata jawaban responden untuk 5 pernyataan adalah 3,88. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang menggambarkan partisipasi masyarakat.

Kompetensi aparatur desa bernilai minimum 2 dan nilai maksimum 5 dengan rata-rata jawaban responden untuk 7 pernyataan adalah 3,71. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang menggambarkan kompetensi aparatur desa. Sistem Pengendalian Internal bernilai

minimum 2 dan nilai maksimum 5 dengan rata-rata jawaban responden untuk 26 pernyataan adalah 4,04. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju terhadap pernyataan yang menggambarkan Sistem Pengendalian Internal.

Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO and Barlett's Test	Keterangan
APDD	0,862	Valid
PM	0,741	Valid
KAD	0,855	Valid
SPI	0,921	Valid

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

Berdasarkan pengujian hasil Cross Loading menunjukkan bahwa indikator-indikator dengan nilai cross loading $>0,50$ adalah valid. Namun terdapat 18 pernyataan yang tidak valid atau sebesar 37,5% pada variabel PM instrument 2, variable KAD instrument 7, variabel SPI instrument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 20, 22, 23, 24, dan 25 yang memiliki nilai Cross Loading $<0,5$ sehingga instrumen tersebut tidak dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Instrumen yang valid sudah dilakukan pengujian validitas lanjutan.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
APDD	0,878	Reliabel
PM	0,841	Reliabel
KAD	0,895	Reliabel
SPI	0,890	Reliabel

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal memiliki Cronbach Alpha $> 0,70$. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Koefisien Regresi

Keterangan	Unstandardized Coefficient		Satndardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.886	0.386		2.296	0.024

PM	0.329	0.085	0.365	3.863	0.000
KAD	0.043	0.068	0.049	0.637	0.525
SPI	0.495	0.129	0.372	3.828	0.000

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

Berdasarkan hasil koefisien regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut::

$$APDD = 0,886 + 0,329 PM + 0,043 KAD + 0,495SP/ + e$$

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 7. Uji R²

R	R Square	Adjusted R Square	Estimate
0,696 ^a	0.484	0.470	0.378

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

Berdasarkan hasil pengujian uji R Square pada tabel 4.8 besarnya Adjusted R Square adalah 0,470. Hal ini berarti variabel Partisipasi Masyarakat (PM), Kompetensi Aparatur Desa (KAD), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) mampu menjelaskan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) sebesar 47,0%, sedangkan sisanya 53,0% (100% - 47,0%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini.

Uji F (Goodness of Fit)

Tabel 8. Uji F

Keterangan	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.200	3	4.733	33.197	0.000 ^b
Residual	15.114	106	0.143		
Total	29.315	109			

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

Berdasarkan hasil uji F, ditunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 33,197 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (5%). Jumlah $n = 110$ dan $k = 3$ maka $df_1 = 3$ (k) dan $df_2 = 106$ ($n-k-1$) serta didapat F_{tabel} sebesar 2,69. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan pada penelitian ini layak atau fit.

Uji t

Tabel 9. Uji t

Variabel	t_{hitung}	Sig	t_{tabel}	Keterangan
PM	3.863	0.000	1.982	H1 Diterima
KAD	0.637	0.525	1.982	H2 Tidak Diterima
SPI	3.828	0.006	1.982	H3 Diterima

Sumber: data primer (2020) diolah kembali

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Setiap warga desa pada desa se-Kecamatan

Muntilan secara aktif terlibat dalam rangka pengambilan keputusan maupun kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat saat kegiatan perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program. Disisi lain masyarakat juga mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa dan memberikan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah desa. Adanya kemauan perwakilan masyarakat, sosialisasi dan hubungan BPD dengan aparat pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat melalui BPD menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin, akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat Crook dan Sverrison dalam Devas *et al.* (2003:309).

Penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Mecking (1976) yaitu bahwa asimetri informasi dapat terjadi di dalam hubungan antara agent dan principal. Partisipasi masyarakat yang efektif adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi dengan cara monitoring cost. Upaya untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi di desa se-Kecamatan Muntilan ini sudah berjalan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berfungsi sebagai pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat membantu dalam memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran. Sehingga apabila partisipasi masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desanya juga akan baik.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Periansya & Sopiyan (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian Umaira & Adnan (2019), Aulia *et al.* (2018), Jannah *et al.* (2018), Perdana (2018), Mada *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Namun, tidak konsisten dengan penelitian dari Perdana (2018) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa kompeten atau tidaknya aparatur desa tidak akan memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan muntilan. Hal ini disebabkan karena kemampuan aparatur pada pemerintahan desa memiliki kelemahan yang tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas. Alasan tidak berpengaruhnya suatu kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena rendahnya tingkat pendidikan dan aspek – aspek pribadi (mencakup sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan). Kompetensi aparatur desa yang rendah ini dikarenakan sebagian besar aparat desa yang bekerja berlatar belakang pendidikan tamatan SMA 58,18% dan SMP sebanyak 18,18% dari seluruh aparat desa.

Kompetensi aparatur desa di Kecamatan Muntilan masih cukup rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; kurangnya keterampilan aparat desa dalam penggunaan teknologi, pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan dana desa dan masih minimnya pemahaman teknis mengenai penyusunan anggaran dana desa. Aparatur desa belum dapat memahami siklus akuntansi dengan baik, sehingga dalam penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran dana desa masih kurang optimal. Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan juga menjadi alasan kompetensi aparatur ini tidak maksimal. Kompetensi aparatur pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola dana desa yang terbilang cukup besar, oleh sebab itu pada pemerintah desa sudah terdapat sistem yang memudahkan seseorang membuat laporan menjadi akuntabel tanpa harus mempertimbangkan tingkat kompetensi (Widyatama *et al.*, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), hubungan antara agen dan *principal* dapat terjadi asimetri informasi. Kompetensi aparatur desa yang baik adalah upaya untuk meminimalisir asimetri informasi yang ada dengan cara bonding cost. Upaya yang dilakukan perangkat desa adalah dengan mengerahkan semua keahlian dan kemampuan aparatur desanya yang dimiliki. Kompetensi aparatur desa yang tidak maksimal di Desa se-Kecamatan Muntilan tidak dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kurang memadainya kompetensi aparatur ini tidak membantu agent atau perangkat desa untuk meminimalisir adanya bonding cost. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Periansya & Sopiyan (2020), Umaira & Adnan (2019), Sapartiningsih, dkk (2018), menyatakan bahwa aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Sistem Pengendalian Internal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, apabila Sistem Pengendalian Internal semakin baik, maka pengelolaan dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan dana desa akan semakin akuntabel. Sistem Pengendalian Internal di Desa se-Kecamatan Muntilan sudah dilaksanakan secara maksimal. Penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintahan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban. Pelaporan pengelolaan keuangan harus dilaporkan secara andal, mengamankan asset dan mendorong ketaatan terhadap perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal pada saat kegiatan berjalan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: wewenang yang diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya, aparatur pengawas internal memberikan keyakinan dan ketaatan sesuai tujuan yang didukung dengan adanya review kinerja. Aparatur juga memiliki fungsi yang berbeda dalam pencatatan, penghapusan dan otorisasi sehingga dapat memperkuat pengamanan asset, karena setiap transaksi harus memiliki bukti pendukung. Sistem Pengendalian Internal juga didukung dengan pemerintah desa yang melakukan evaluasi mengenai kelebihan dan kelemahan untuk memperbaiki pengendalian internalnya. Sistem Pengendalian Internal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi desa (Alkins, 2011).

Penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Mecking (1976), yang menyatakan bahwa hubungan agents dan principal memungkinkan timbulnya asimetri informasi. Sistem Pengendalian Internal secara optimal di desa se-Kecamatan Muntilan adalah upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara monitoring cost. Sistem pengendalian internal secara optimal ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 aparat desa yang mengelola dana desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan rakyat, kadus dan bpd.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Keterbatasan

- a. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan baru desa se-Kecamatan Muntilan yang berjumlah 13 desa, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di desa di Kabupaten Magelang.
- b. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. Saran

- a. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh desa se-Kabupaten Magelang serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, misalnya seperti Sistem Keuangan Desa (Arfiansyah, 2020), Penyajian Laporan Pertanggungjawaban (Hasibuan, 2020), Gaya Kepemimpinan (Rizal & Hermanto, 2019) dan Standar Akuntansi Pemerintah (Pramudita, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Intern Pada PT. Avian Avian.
- Alkins, S. K. (2011). An Examination Of Government Internal Audit's Role In Improving Financial Performance. *Journal Of Public Finance And Management*, 11, 306.
- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*. <https://doi.org/10.31603/Bisnisekonomi.V16i2.2620>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Islamic Finance And Accounting*.
- Arifiani, T. A., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* [JSKPM]. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.3.317-332>

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019a). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se- Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019b). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se- Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*.
- Aulia *Et al.* (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- BPPKAD Kabupaten Magelang. (N.D.).
- Devas, Nick, & Grant Ursula. (2003). Local Government Decision Making Citizen Participation And Local Accountability: Some Evidence From Kenya And Uganda. *Public Administration And Development*. 23, 309.
- Dewi, N. K. A. J. P. D., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298.
- DPR R1. (2019). Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian. Ghazali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Sialang Kecamatan Tambusi. *Jurnal Cano Ekonomos*, 8(2), 48. [Http://Www.Mediaindonesia.Com](http://Www.Mediaindonesia.Com). (N.D.). /Read/Detail/128167-Menata-Ulang-Alokasi- Danadesa (April 27, 2018).
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The Influence Of Human Resources, Use Of Information Technology And Public Participation To The Transparency And Accountability Of Village Financial Management. *International Journal Of Scientific Research And Management*, 06(05), 373–385. <https://doi.org/10.18535/Ijsrm/V6i5.Em03>
- Jensen, & Mecking. (1976). The Teory Of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, And Ownership Structure. *Journal Of Financial And Economic*, 3, 305–360.
- Kumalasari, L. (2019). Prngaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitis Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Kepala Desa Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Bayat).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.

JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL.”
<https://doi.org/10.35800/Jjs.V8i2.17199>

- Mahkamah Konstitusi. (2014). UU No 6 Tahun 2014. In UU No 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Yang Ada Di Desa.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi (Edisi Empat)*. Salemba Empat.
- Nurkhasah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nurul Nadila Idward. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). *Skripsi State Islamic University Alaudin Makasar*.
- Peraturan Bupati No 2. (2019). *Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 (Pp. 1–19)*.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.
- Periansya, & Sopiyan. (2020). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya*, 21.
- Pramudita, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Value For Money Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.
- Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Pemahaman, Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng 1. *Jurusan Akuntansi*, 8(2).
- Rizal, N., & Hermanto, S. (2019). Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 100–114. <https://doi.org/10.1007/S11664-018-06850-8>

- Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2017). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang Novia ISSN : XXXX-XXXX. Jurnal Mahasiswa UNSERA, 1–9.
- Semarang.Bpk.Go.Id. (N.D.). [Http://Semarang.Bpk.Go.Id/?P=13801](http://Semarang.Bpk.Go.Id/?P=13801). Diakses 16 Maret 2019
- Sugista. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studiempiris Di Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019a). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4 (3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/Jimeka.V4i3.12580>
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019b). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. <https://doi.org/10.24815/Jimeka.V4i3.12580>
- Undang - Undang No 6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang - Undang No 6 Tahun 2014 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). STIE Panca Bhakti. Palu.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. 02.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. ASET (AKUNTASI RISET).
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan.